Journal of Humanity Studies
Volume 1 (2), Tahun 2022, 85 - 94

# STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PAHAM RADIKALISME DI ERA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KALANGAN REMAJA

**Mastina Maksin**
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Panca Marga
Email: mastinamaksin@upm.ac.id

## ABSTRACT

*Radicalism is an ideology or flow that wants social and political change or renewal by violent or drastic means, this is carried out by radical groups which justify various ways of carrying out their actions even though they take many victims, by justifying the teachings adhered to by these groups. As well as the radicalism network spreading various forms of propaganda to openly recruiting group members through social media or the internet, so that this becomes a problem where based on BPS data the population in Indonesia is dominated by productive groups, namely young people who are included in the category of Millennials and Generations "Z" so that this becomes a form of special concern because it can become a time bomb in the future if these teenagers are trapped and take part in the ideology of radicalism which ends in acts of terrorism. As for the method used in this research or writing, it uses a qualitative descriptive method with the hope that it can contain an in-depth and specific description or description of an article or a matter observed by the researcher. With the method used, it can be concluded that there are several strategies made by the government through the National Counterterrorism Agency (BNPT) and through the Ministry of Religion in counteracting radicalism in the era of social media use among adolescents.*

***Keywords:*** *government strategy, radicalism, social media, teenagers*

## PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa "Radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan social dan politik dengan cara kekerasan atau drastis" dikutip dalam (Depdiknas,2002). Paham radikalisme erat kaitannya dengan gerakan-gerakan terorisme yang ada, penyebaran paham atau aliran tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Lahan empuk bagi kelompok tersebut adalah negara yang lemah atau dikatakan gagal, dengan kondisi ekonomi, politik dan social yang tidak seimbang. Melihat kondisi yang ada bahwa masih terdapat tindakan-tindakan terorisme yang ada di Indonesia. Berkembangnya organisasi teroris yang ada di Indonesia seperti Jamaah Islamiyah,

Jamaah Anshorhud Tauhid dan Jamaah Anshorhut Daulah serta Al-Qaeda dinilai cukup responsif terhadap kalangan pemuda yang masih dangkal dalam pengetahuan agama islam sehingga para actor intelektual dari jaringan teroris tersebut mudah untuk melakukan perekrutan terhadap pemuda yang mudah untuk dipengaruhi terkait paham Radikalisme. Hal tersebut menjadi ancaman yang vatal karena generasi muda atau kalangan remaja merupakan generasi penerus bangsa. Banyak kasus tentang aksi-aksi teror yang ada di Indonesia yang terbaru ialah telah ditangkapnya sebanyak 24 terduga teroris yang ditangkap disepanjang Desember 2022 yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dikuti dari (CNN Indonesia). Dengan kasus-kasus tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga melebarkan kelompok mereka dengan merekrut anggota-anggota baru untuk dapat bergabung dengan ajaran mereka. Salah satu tempat untuk melancarkan aksi penyebaran paham radikal s adalah melalui media social atau melalui teknologi informasi, karena pada saat ini hampir semua orang khususnya remaja menggunakan media social skarena dirasa mudah dalam melakukan aksi Cyberterrorism, propaganda hingga aksi perekrutan anggota jaringan kelompok radikal. Hal inilah yang mengakibatkan penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang bagaimana strategi pemerintah dalam mencegah paham Radikalisme di Era penggunaan Media social di kalangan remaja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, dikutip dalam Wiratna (2014:19). Sehingga dalam hal ini penelitian atau penulisan yang dilakukan diharapkan dapat memuat uraian atau gambaran yang mendalam dan spesifik tentang suatu tulisan maupun suatu hal yang diamati dari perilaku individu maupun kelompok sehingga dapat dikaji dan dianalisis lebih mendalam dengan konteks yang diambil oleh seorang peneliti. Sehingga peneliti dapat memberikan gambaran real yang ada di lapangan secara spesifik yang dituangkan dalam bentuk uraian-uraian. Jenis penelitian juga menggunakan studi dokumen atau teks yang berupa kajian dari bahan documenter yang tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, artikel dan sejenisnya, dikutip dalam Wiratna (2014:23). Dalam hal ini focus yang diambil dalam penulisan ini adalah bagaimana strategi pemerintah dalam mencegah paham Radikalisme di Era penggunaan media social di kalangan remaja. Menuerut Sugiyono (2020:54) menyatakan bahwa dalam metode deskriptif kualitatif yang menjadi focus penelitian dilihat secara menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya

berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi social yang berkaitan dengan penelitian atau penulisan yang dilakukan karena merupakan suatu interaksi yang sinergi.

## PEMBAHASAN

Modernisasi merupakan proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau yang sering dikenal dengan masyarakat modern. Modernisasi memberikan dampak yang beragam mulai dari dampak positif hingga dampak negative. Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan social. Biasanya merupakan perubahan social yang terarah atau yang disebut dengan (*Directed Change*) yang didasarkan pada perencanaan atau dapat juga dikatakan sebagai *Intended* atau *planned-change* atau yang erat kaitannya dengan istilah *social Planning*. Akan tetapi Modernisasi juga dikatakan sebagai suatu bentuk permasalahan atau problematika yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan karena terdapat suatu proses yang menyangkut berbagai bidang yang sangat luas, misalnya menyangkut proses disorganisasi, problematika social serta konflik antarkelompok.

Salah satu problematika yang dihadapi saat ini adalah problematika social yang berakibat vatal terhadap ideology bangsa yakni tentang adanya kelompok radikal yang melancarkan aksinya di wilayah Indonesia, bahkan sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) telah terpapar atau ikut andil dalam kelompok radikal tersebut. Kelompok radikalisme melancarkan tujuannya dengan berbagai macam cara, Pemerintah dalam hal ini harus bertindak serius karena telah terdapat beberapa kasus dimana kelompok radikal telah berusaha menyebar paham radikal melalui media digital dikutip dalam (Kominfo.go.id).

Pesan-pesan yang bermuatan radikalisme mudah diperoleh dari konten di situs online maupun di media social. Anak-anak muda saat ini menjadi lahan penyebaran paham radikalisme, penghasutan yang dilakukan oleh kelompok tersebut digunakan sebagai bentuk mencari massa atau merekrut mereka agar ikut bergabung dengan kelompok tersebut. Dapat diketahui jika remaja atau anak muda saat ini memiliki sifat penasaran dan keingintahuan yang sangat tinggi, hal tersebut sebenarnya suatu hal yang positif jika diarahkan dengan baik, akan tetapi dengan media social yang tidak melihat batas usia dan tidak dapat dipantau secara spesifik dapat berakibat vatal jika hal tersebut terus dibiarkan. Karena yang dapat mengendalikan atau mencegah masuknya paham radikalisme masuk di kalangan remaja adalah dengan membentengi mereka melalui ketahanan dan pemahaman terhadap jiwa nasionalisme yang mendalam, pembentukan wawasan kebangsaan atau jiwa nasionalisme dikalangan remaja harus dapat ditanam sejak dini, guna dapat membentuk jiwa mereka agar tidak termakan dengan paham atau

aliran dan ideologi-ideologi yang dirasa menyimpang dari ideologi bangsa dan negara yang dapat berakibat vatal terhapat pertahanan negara nantinya. Oleh karena itu, maka dengan adanya problematika penyebaran paham radikalisme melalui media social atau media massa mengakibatkan pemerintah harus membuat suatu strategi atau suatu tindakan guna meminimalisir atau mencegah sejak dini paham radikalisme di era penggunaan media social di kalangan remaja. Penyebaran paham radikalisme yang berdampak terhadap aksi-aksi teror telah terjadi sejak lama, sehingga terdapat rekam jejak terorisme modern di Indonesia. Secara umum rekam jejak aksi terorisme di Indonesia digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1. Rekam Jejak Aksi Terorisme di Indonesia Tahun 2012-2022**

| No. | Waktu | Kejadian |
|---|---|---|
| 1. | 19 Agustus 2012 | Penembakan terhadap anggota polisi di Pospam Gladak Solo |
| 2. | 30 Agustus 2012 | Penembakan di jalan Veteran Solo Jawa Tengah, menyebabkan dua orang meninggal dunia atas nama Fahran dan Mukson |
| 3. | 1 September 2012 | Penembakan Bripda Suherman di Lotemart Solo |
| 4. | 9 September 2012 | Terjadi ledakan di Jalan Raya Nusantara/ Bejo Depok Jawa Barta, penyebabkan tiga orang mengalami luka-luka atas nama tofik hidayat dan febri bagus. |
| 5. | 2015-2017 | Kapolri Tito Karnavian menyebut ada 31 kasus terorisme salah satunya yakni Bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu. |
| 6. | 8 Mei 2018 | Aksi teror bermula dari amukan sejumlah narapidana dan tahanan kasus terorisme di rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil di kelapa dua Depok Jawa Barat |
| 7. | 13 Mei 2018 | Teror bom bunuh diri terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur |
| 8. | 2019 | Terdapat lima peristiwa teror yakni Bom sibolga (Sumatra Utara), Pos Polisi Kartasura (Sukoharjo jawa tengah), penyerangan dengan Modus melapor (Polsek Wonokromo Surabaya),Penusukan Wiranto (Kab. Pandeglang), Polrestabes Medan dengan adanya bom bunuh diri (Medan Sumatra Utara) |
| 9. | 2020-2022 | Densus 88 tangkap 658 anggota jaringan Terorisme |

Sumber: Marthen Luther Djari, (2013; 88), Detiknews Mei 2017, CNN Indonesia Desember 2018, Kompas.com edisi Desember 2019. KompasTv Maret 2022.

Dari rentetan kasus tersebut dapat disimpulkan jika, penyebaran paham radikal masih tetap berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kasus-kasus teror yang terjadi. Salah satu tujuan dari aksi teror tersebut adalah untuk membuat rasa takut yang mencekam, keadaan yang menakutkan, kegentaran (Budi Gunawan, 2006;1-2) dikutip dalam Marthen (2013:10). Meskipun hingga saat ini pembatasan dan pengertian terorisme belum disepakati secara universal, karena disamping banyaknya elemen terkait, juga karena banyak pihak mempunyai kepentingan menerjemahkan terminology terorisme dari sudut pandang dan kepentingannya termasuk setiap negara atau lembaga merumuskan definisinya sendiri-sendiri. Akan tetapi hal yang dapat disimpulkan lebih jauh dari aksi teror dan penyebaran paham radikal yang dilakukan adalah untuk membuat kondisi kacau dan menakutkan di tengah masyarakat. Pada saat ini negara selalu berada di bawah ancaman, ancaman tersebut disebut dengan ancaman nonmiliter yakni dimana ancaman yang dilakukan oleh pihak lawan bukan ancaman yang bersifat fisik (militer/peperangan) tetapi ancaman yang bersifat non fisik. Ancaman nonmiliter yaitu ancaman berdimensi ideology, politik, ekonomi, social budaya, dan keamanan yang berkembang, pada eskalasi tertentu dapat mengganggu stabilitas nasional yang pada hakekatnya akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dengan ancaman aksi teroris yang dilakukan oleh teroris internasional, teroris internasional yang bekerja sama dengan teroris dalam negeri secara mandiri yang dapat mengancam keselamatan bangsa, negara dan masyarakat (peraturan panglima TNI nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;2010, 27,28).

Perkembangan teknologi informasi membawa kemajuan positif bagi kehidupan manusia, namun terdapat pula yang memanfaatkannya untuk tujuan negative dengan menebar teror. Salah satu kelompok yang paling giat adalah Al-Qaeda. Bahkan disebut bahwa Al-Qaeda sebagai organisasi penebar teror terbesar diseluruh jagat dunia, telah memanfaatkan dunnia *cyber*. Penggunaan teknologi internet bagi kelompok atau jaringan terorisme bukan merupakan suatu hal yang baru. Internet dipergunakan sebagai media indoktrinasi, propaganda, rekruitmen dan pelatihan aksi teror. Salah satu kasus yang berkaitan akan hal ini adalah seperti kasus peledakan bom Bali, dimana media komunikasi yang digunakan yakni melalui email, melalui jaringan internet serta kasus lain seperti telah ditangkapnnya di tahun 2018 di wilayah kota Probolinggo bahwa jaringan pelaku teror tersebut juga belajar melalui media youtube atau internet dalam merakit bom, tanpa harus belajar di ruang kelas, bahkan dalam waktu yang amat singkat mereka dapat mahir membuat bom. Bahkan berbagai media menyebutkan hampir setiap

penangkapan teroris aparat keamanan menemukan perangkat berbasis teknologi informasi sebagai alat mendukung gerakan kekerasan. Dikutip dalam Marthen bahwa anggota *Internasional High Technology Crime Investigation Association* (HTCIA) menilai, kelompok teroris memilih internet sebagai media untuk penyebaran informasi dan komunikasi karena pertimbangan factor keamaan. Internet lebih aman dari pada SMS atau telepon. Bebapa hal yang dapat dilakukan kelompok teroris melalui internet ialah 1) Cyberterrorism (terorisme ciber) , 2) Publisitas dan propaganda, 3) Data Mining 4) pendanaan, 5) Rekruitmen, 6) komunikasi dan jaringan, 7) Disinformasi. Dari ketujuh hal yang dilakukan kelompok teroris guna menyebarkan paham radikal melalui teknologi informasi atau media social maka hal tersebut menjadi sebuah gambaran tentang bagaimana Cyberterrorism sebagai alat bantu dan target para teroris dalam melakukan aksi teror atau serangan yang ingin dilakukan (2013:49). Apabila cara-cra tersebut dipadu dengan sebuah *Weapon of Mass Destruction, Bioterrorism*, dan cara konfensional lainnya maka hal tersebut secara langsung akan menjadi suatu bentuk kekuatan yang sangat luar biasa. Untuk itu maka pemerintah perlu mencermati ancaman-anacaman penyebaran paham radikal diera penggunaan media social atau teknologi informasi dengat sangat cermat karena hal tersebut berdampak vatal bagi kedaulatan dan keutuhan bangsa.

Banyak pihak yang menilai jika aksi terorisme yang terjadi tak lepas dari kepentingan politik, sehingga kajian akan hal politik seharusnya juga harus menjadi pemikiran yang mendalam. Pengaruh media social atau massa justru dapat makin mempercepat penyebaran berita atau informasi mengenai aksi terorisme dan penindakannya. Siaran langsung suatu media atas kebiijakan penindakan aksi terorisme rupanya juga ikut memicu simpatisan terorisme baru. Maka dari itu kebijakan penanggulangan atau cara menangkal masuknya paham radikalisme sebelum terjadinya aksi teror tidak boleh parsial, tetapi justru harus bersifat komprehensif, dengan melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat guna bersama-sama mewaspadai dan mencegah apa yang terjadi di lingkungan ssekitar termasuk di lingkungan keluarga jika terdapat tanda-tanda yang mencurigakan, karena kebanyakan kasus terorisme dengan paham radikal yang dibawanya melibatkan satu kelurga yang ikut andil dalam aksi atau jaringan kelompok radikal tersebut. Hingga dalam hal ini pemerintah wajib secara terus menerus melakukan deradikalisme dengan memantapkan jiwa nasionalisme bagi para penerus bangsa dan negara yakni kalangan remaja atau para anak muda. Karena sangat tipis sekali antara problematika penyebaran radikal dengan penggunaan teknologi informasi atau media social saat ini, sehingga penguatan mental dan ideology sangat diperlukan. Karena penindakan terorisme dengan menggunakan suatu penegakan hukum atau secara koersif hanya berlaku dalam jangka pendek dalam menyelesaikan aksi radikal di permukaan, akan tetapi hal tersebut memiliki kelemahan mendasar

karena belum menyelesaikan akar permasalahannya yaitu menyebarkan ideology radikal terorisme di tengah masyarakat. Sehingga yang menjadi titik focus disini adalah bagaimana masyarakat dapat memahami pencegahan akan hal tersebut. Dimensi pencegahan terorisme merupkan suatu spektrum dalam strategi penanggunalan atau dalam menangkap aksi radikal terorisme yang mengedepankan pendekatan persuasive (*soft approach*). Dimensi ini memainkan peran penting dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikal terorisme di tengah masyarakat guna mencegah terjadinya suatu aksi teror. Pelibatan aktif seluruh komponen bangsa dan masyarakat dalam rangka pencegahan terorisme adalah hal yang sangat utama yang harus ditegakan guna memperkuat ketahanan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap ancaman penyebaran paham radikal yang berujung terhadap aksi terorisme melalui tindakan atau aksi kekerasan yang bengakibatkan banyak korban. Seperti yang dikutip dalam Marthen bahwa bidang pencegahan BNPT telah melakukan dua strategi pencegahan. pertama, deradikalisasi (rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi) ditujukan kepada kelompok inti dan militant (ideology) jaringan terorisme. Strategi kedua, kotra radukalisasi (perlindungan obvit, trasportasi, VVIP, dan lingkungan serta penangkalan ideology) dilakukan kepada seluruh elemen masyarkat agar tidak mudah menjadi target aksi dan penyebaran ideology radikal terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas menyusun dan mengeluarkan kebijakan, startegis sekaligus menjadi coordinator dalam bidang pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, *soft approach*, penindakan melalui *hard approach*, serta penyiapan kesiapsiagaan nasional serta kerja sama internasional. Hal tersebut tertuang dalam Perpres no. 12 tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Seluruh bentuk pencegahan juga menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh komponen yang ada di suatu negara dalam mencegah masuknya paham radikal di kehidupan masyarakat khususnya dalam hal ini remaja. Remaja merupakan asset penerus bangsa yang harus dijaga ideologinya agar tidak terpapar ideologi-ideolgi yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa, pemerintah harus mampu melakukan tindangan pencegahan sejak dini dan deteksi sejak dini terhadap apa yang terjadi di lapangan, pemupukan rasa nasionalisme merupakan suatu bentuk mendasar dan penting karena dapat memperkuat akar ideology dan jiwa nasionalis remaja agar tidak goyah dengan paham atau aliran-aliran ideologi yang masuk. Jika dasar atau akar yang dimiliki para remaja kuat dan kokoh maka tingkat kegoyahan dengan paham atau ideologi yang tidak sesuai tidak akan terjadi karena secara langsung mereka telah terbentengi dengan ideology yang ada dan pengetahuan agama yang kuat. Sosialisasi dan tindakan deteksi dini cegah dini perlu selalu dilakukan terhadap para remaja, strategi pemerintah dalam hal ini menderadikalisasikan melalui aksi pencegahan

sejak dini memang selalu dilakukan sebagai bentuk tindakan *soft approach* bagi para penerus bangsa. Karena jaringan tersebut melakukan sebuah gerakan yang mengatasnamakan agama yang seolah-olah benar dalam menyebarkan paham atau alirannya meskipun melalui berbagai macam cara terutama kekerasan yang menyangkut banyak korban. Serta dengan adanya perkembanagn teknologi informasi dan media social yang cukup pesat harus menjadi langkah cepat dalam penangkalan karena modus penyebaran yang disampaikan sangat mudah menarik kalangan remaja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia didominasi oleh kelompok produktif yaitu anak muda yang termasuk dalam kategori generasi Milenial dan generasi "Z", sehingga hal ini menjadi suatu bentuk perhatian khusus karena dapat menjadi Bom waktu dikemudian hari apabila para kalangan remaja ini justru terjebak dan ikut andil dalam ideologi radikalisme yang berujung aksi terorisme, hal tersebut disampaikan oleh Komjen Pol. Dr. Boy Rafli selaku Kepala BNPT, dikutip dalam (Bnpt.go.id; 2021). Berikut adalah beberapa strategi yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangkal atau mencegah paham radikalisme di era penggunakan media social di kalangan remaja, hal tersebut terdiri dari:

1. Pertama, BNPT menghimbau agar keluarga menjadi factor utama dalam mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan remaja, jangan sampai anggota keluarga ikut kegiatan yang mengarah terhadap tindakan dan aksi terorisme dengan pahan radikal dan intoleran yang dianut.
2. Kedua, BNPT menghimbau dalam menangkal virus radikal dan terorisme juga harus dapat melibatkan tokoh agama yang selalu mengajarkan pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan konsep yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Ketiga, BNPT membuat suatu program pencegahan secara massif dengan membuat konten toleransi, berdamai dan cinta tanah air dalam membendung propaganda teroris di media social.
4. Keempat, BNPT selalu melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap konten-konten propaganda teroris kepada kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo) agar ditindak lanjuti.
5. Kelima, disampaikan oleh kementerian agama bahwa perlu adanya pembinaan Agama bagi sistem di sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.
6. Keenam, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga/Ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu dalam upaya mencegah paham Radikalisme.

7. Ketujuh, yakni melakukan penanggulangan paham Radiklaisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat dikutip dalam (Kemenag.go.id).

Sehingga dengan beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi tindakan pencegahan yang melibatkan banyak bidang di dalamnya untuk dapat mencegah paham radikalisme di era penggunaan media social di kalangan remaja yang semakin banyak dilakukan oleh jaringan-jaringan kelompok radikal dalam menyebarkan aksi propaganda dan aksi teror melalui media social atau internet.

## SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil bahwa penyebaran paham radikalisme di kalangan remaja memberikan dampak yang sangat vatal, kelompok jaringan radikal terorisme bahkan melancarkan aksinya melalui media social, internet atau teknologi informasi. Banyak hal yang dilakukan dalam penyebaran paham radikal melalui teknologi informasi seperti 1) Cyberterrorism (terorisme ciber) , 2) Publisitas dan propaganda, 3) Data Mining 4) pendanaan, 5) Rekruitmen, 6) komunikasi dan jaringan, 7) Disinformasi. Dan dari ketujuh hal tersbeut harus menjadi hal yang penting yang harus di lihat dan direspon oleh pemerintah. Beberapa strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menangkal paham radikalisme di era penggunaan media social di kalangan remaja adalah pembentukan Badan Nasional Penanggunalangan Terorisme (BNPT) dalam memberikan tindakan *soft approach* dan *hard approach* serta pemerintah juga melakukan sinergitas melakukan sosialisasi serta aksi deradikalisasi penanaman wawasan kebangsaan dan pemantapan jiwa nasionalisme yang dilakukan secara terus menerus guna membentengi kalangan remaja sejak dini sehingga dapat mencegah jika adanya aliran-aliran ideology yang tidak sesuai dengan ideology bangsa yang berada di lingkungan sekitar mereka, dimana juga terdapat beberapa strategi pencegahan dari pemerintah melalui BNPT dan Kementrian Agama yakni terdapat tujuh strategi didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

BNPT. 2021. Cegah Paham Radikalisme pada anak muda, diakses melalui bnpt.go.id, pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 08.13.

CNN Indonesia. 2018. Aksi Brutal Kelompok teror di 2018 sasar markas Polisi, diakses melalui cnnindonesia.com, pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 08.44

Detiknews.2017. Kapolri: sejak 2015 ada 336 tersangka kasus terorisme, diakses melalui news.detik.com, pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 08.30.

KompasTv. 2022. Sepanjang 2020 hingga Maret 2022, Densus 88 tangkap 658 anggota jaringan terorisme, diakses melalui Kompas.tv, pada tanggal 23 Desember 2022, pukul 10.03

Kemenag. 2019. Begini Upaya Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan Generasi Muda menurut Jamzuri, diakses melalui Kepri.kemenag.go.id, pada tanggal 22 Desember 2022, Pukul 13.37.

Lemhannas. 2016. Menangkal Radikalisme di Kalangan Generasi Muda, diakses melalui lemhannas.go.id, pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 14.15.

Marthen, Luther, 2013 . *Terorisme dan TNI* . Jakarta: VMB PRESS.

Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/45/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;2010, 27,28

Soerjono ,Soekanto, 2013 . *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta

Wiratna, Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress